

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH PADA KANTOR CAMAT KUTA UTARA

Hendrika Wangkung¹, Rai Gina Artaninggrum²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Bisnis dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Jl. Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, Bali, Indonesia.
Email: 20111501062@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor Camat Kuta Utara. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini adalah Kantor Camat Kuta Utara, dan objek dalam penelitian ini adalah penerapan sistem keuangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa rekapitulasi laporan keuangan penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Kantor Camat Kuta Utara tidak ada pemisahan yang dilakukan dalam pencatatan. Transaksi yang menyebabkan pengeluaran dan penerimaan kas hanya dicatat didalam buku kas umum. Pemerintah pada Kantor Camat Kuta Utara belum menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dikarenakan Penerapan akuntansi laporan keuangan pemerintah saat ini diterapkan belum semua dipahami oleh masing-masing entitas akuntansi maupun entitas pelaporan dan menjadi alasan perlunya dilakukan pelatihan tenaga akuntansi. Peningkatan SDM akuntansi ini menjadi modal penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, Sistem pengendalian Intern yang masih lemah dalam hal pemantauan, Sistem akuntansi keuangan daerah masih lemah dalam hal pencatatan.

Kata kunci: Sistem, Keuangan, Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan

Pada era reformasi ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang. Dalam mewujudkan suatu laporan keuangan yang baik tentunya dibutuhkan suatu alat atau prosedur untuk mendukung laporan tersebut, sehingga dibentuklah suatu sistem yang dapat mengelola laporan keuangan dengan baik dan juga berpedoman pada peraturan yang berlaku. yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang- Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan. Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah berlaku umum. Hal tersebut diatur dalam Undang _ Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Akuntansi Pemerintah (Governmental accounting) berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga- lembaga pemerintah. Pencatatan itu mencakup administrasi keuangan, pelaporan, dan pengontrolan anggaran. Akuntansi Pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.

2. Metode

Penelitian ini mengambil tempat di kantor camat Kuta Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung staff bagian keuangan pada kantor camat Kuta Utara mengenai aktivitas, sejarah perkembangan, kebijakan operasional, serta kebijakan dibidang akuntansi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti dalam hal ini, yaitu proses transaksi keuangan pada kantor camat Kuta Utara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pada kantor camat Kuta utara.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Sebagai organisasi yang memegang peran utama dalam pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintah.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, walaupun belum ada PP dan aturan yang menindaklanjuti sampai LKjIP ini dibuat, dimana Kecamatan bukan lagi sebagai Wilayah Administrasi dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah apalagi dengan Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan mengakibatkan adanya perubahan mendasar dalam menentukan arah kebijakan Kecamatan. Mencermati kedudukan dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah, terkandung maksud dan tujuan dari pemerintah untuk memposisikan kecamatan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terkontaminasi unsur-unsur politik praktis yang berkembang di masyarakat.

Kecamatan Kuta Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Luasnya adalah 33,86 km². Pada tahun 2004, penduduknya berjumlah 54.640 jiwa. Kuta Utara merupakan salah satu tujuan turis asing berkunjung ke Bali.

Sistem Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sumber daya manusia yang berguna untuk mengubah data menjadi informasi, baik yang terkomputerisasi maupun manual. Sistem akuntansi nantinya akan menghasilkan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan serta mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan kepada pihak di luar perusahaan, laporan keuangan yang baik dapat dicapai dengan pemanfaatan teknologi untuk membangun sistem informasi dan proses kinerja yang bertujuan agar pemerintah bekerja maksimal sehingga mempermudah akses antar unit kerja.

Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Sedangkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 184 ayat 3 mengatakan bahwa: akuntansi pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Adapun karakteristik akuntansi pemerintah tersebut adalah:

1. Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga didalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statemen) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan
3. Di dalam akuntansi pemerintah di mungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana
4. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan operasional.
5. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
6. Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang di tahan neraca.

Pelaporan Arus Kas Pada Pemerintah Kantor Camat Kuta Utara

Pada dasarnya Pemerintah Kantor Camat Kuta Utara dalam mengelola Keuangan Pemerintah berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah harus memiliki laporan Arus Kas yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 paragraf 4 yang berbunyi pernyataan standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lain jika menurut peraturan perundang – undangan menurut standar, satuan organisasi di maksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara atau daerah yang diatur tersendiri dalam standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia

Sedangkan pada Kantor Camat itu sendiri tidak membuat laporan Arus Kas, seharusnya dalam sebuah instansi Pemerintah di haruskan membuat laporan Arus Kas karena laporan Arus Kas termasuk dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Berikut laporan Arus Kas berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran pada kantor Camat Kuta Utara Kabupaten Badung.

Tabel 1. Laporan Arus Kas Pemerintah Kantor Camat Kuta Utara Kabupaten Badung

No.	Uraian	2022	2023
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2	Arus masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Penghasilan		
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan barang mewah		
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		

6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		
7	Pendapatan Cukai		
8	Pendapatan Bea Masuk		
9	Pendapatan Pajak Ekspor		
10	Pendapatan Pajak Lainnya		
11	Pendapatan Sumber Daya Alam		
12	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		
13	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		
14	Pendapatan Hibah		
15	Pendapatan Retribusi	7.500.000	10.551.000
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14) Arus Kas Keluar	7.500.000	10.551.000
17	Belanja Pegawai	875.611.342	762.008.645
18	Belanja Barang	254.135.350	289.096.090
19	Bunga		
20	Subsidi		
21	Hibah		
22	Bantuan Sosial		
23	Belanja Lain – lain		
24	Dana Bagi Hasil Pajak		
25	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
26	Dana Alokasi Umum		
27	Dana Alokasi Khusus		
28	Dana Otonomi Khusus		
29	Dana Penyesuaian		
30	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 29)	1.129.746.692	1.051.104.735
31	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (15-30)	(1.122.246.69)	(1.040.553.73)
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualanatas Tanah		
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		
38	Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya		
39	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya		
40	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)	0.00	0.000
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah		
43	Belanja Peralatan dan Mesin	198.106.000	10.612.500
44	Belanja Gedung dan Bangunan	200.206.000	11.612.50
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	600.000	
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.500.000	1.000.000
47	Belanja Aset Lainnya		
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 39)	200.206.000	11.612.50
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40-48)	200.206.000	11.612.500

50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri sektor Perbankan		
53	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Obligasi		
54	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya		
55	Penerimaan dari Divestasi		
56	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
57	Penerimaan kembali Pinjaman Kepada Daerah		
58	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		
59	Penerimaan kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional		
60	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 59)	0.00	0.00
61	Arus keluar Kas		
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Sektor Perbankan		
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi		
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya		
65	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)		
66	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		
69	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional		
70	Jumlah Arus Keluar Kas (62 s/d 69)	0.00	0.00
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (60-70)	0.00	0.00
72	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
73	Arus Masuk Kas		
74	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
75	Kiriman Uang Masuk		
76	Jumlah Arus Masuk Kas (74 s/d 75)	0.00	0.00
77	Arus keluar Kas		
78	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
79	Kiriman Uang Keluar		
80	Jumlah Arus Keluar Kas (78 s/d 79)	0.00	0.00
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (76-80)	0.00	0.00
82	Kenaikan/Penurunan Kas (31+49+71+81)	(922.040.692)	(1.028.941.23)
83	Saldo Awal Kas di BUN	681.700	1.344.882
84	Saldo Akhir Kas di BUN (82+8)	(921.358.992)	(1.027.596.35)

85	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	681.700	1.344.882
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
87	Saldo Akhir Kas (84+85+86)	(920.677.292)	(1.026.251.47)

Tabel 2. Buku Kas Umum Penerapan Akuntansi Keuangan pada Pemerintah Kantor Camat Kuta Utara

Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
01/12/2023	Diterima SP2D/LS Kegiatan Belanja jasa tenaga	14.550.000		14.550.000
01/12/2023	Tekhnis kantor	64.240.000		78.790.000
01/12/2023	Di terima SP2D/LS Kegiatan Belanja tambahan penghasilan PNS		31.200.200	47.589.800
01/12/2023	Di bayar Gaji pokok PNS		2.282.000	45.307.800
	Di bayar Utang PPh 21 tambahan penghasilan PNS			

Tabel 3. Buku Jurnal Penerimaan kas.

Tanggal	Nomor SP2D / Nota Kredit	Kode	Uraian	Ref	Jumlah	Akumulasi
01/12/2023			Saldo awal			
01/12/2023			Kasda		14.550.000	14.550.000
01/12/2023			Kasda		65.240.000	79.790.000
					79.790.000	94.340.000

Tabel 4. Buku Jurnal Pengeluaran kas

Tanggal	Nomor SP2D / Nota Kredit	Kode	Uraian	Ref	Jumlah	Akumulasi
01/12/2023			Saldo awal			
05/12/2011			Gaji PNS		31.200.200	31.200.200
20/12/2011			Utang pph 21		2.282.000	33.482.000

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan dapat di simpulkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang sistem akuntansi keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Kuta Utara Kabupaten Badung:

1. Laporan arus kas pada Kantor Camat Kuta Utara Kabupaten Badung belum menyajiakn Laporan Arus Kas, sedangkan dalam suatu instansi diharuskan menyajikan laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.
2. Sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Kantor Camat Kuta Utara Kabupaten Badung belum melakukan pemisahan dalam pencatatan. Transaksi yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas hanya dicatat kedalam buku kas umum
3. Belum melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap.
4. Penerapan sistem akuntansi keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Kuta Utara Kabupaten Badung belum sesuai dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

5. Daftar Rujukan

- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Deliza Henny, Rebecka, S. D., & Yanti, H. B. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*
- Fikri, H., Kamilah., 2023. Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Sei Suka
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.
- Ilham, M., Suhendro, D., & Maulana, A. (2019). Aplikasi Sistem Akuntansi Pembelian dan Penjualan barang pada PT. Bonar Jaya Adi Perkasa Nusantara Pematangsiantar

